



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS SISWANTO
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 915761

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 319.065.000**

1. Tanah Seluas 21.580 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 107.900.000
2. Tanah Seluas 20.060 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 100.300.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 503 m2/48 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 7.734 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 38.670.000
5. Tanah Seluas 8.439 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 42.195.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 440.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T (GUN165R-SDT) Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3G MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 7.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 62.256.336**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 828.821.336**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

828.821.336

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.